

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dapat tersusun dengan lancar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya selanjutnya disebut LAKIP-SKPD ini merupakan laporan pencapaian Kinerja dalam Tahun 2022, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sehingga diharapkan program dan kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Kami mengharapkan LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahun 2022 untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semoga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya bersama masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang kita cintai ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

WAMENA, MARET 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA/TK I
NIP. 19710806 199712 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran dicapai dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika rata-rata telah tercapai 80,38% atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa keseluruhannya mendapat kategori berhasil. Keberhasilan yang dicapai tersebut tetap menjadi tolak ukur bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk semakin menyempurnakan kinerja di tahun berikutnya, mengingat tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks.

WAMENA, MARET 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19710806 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI.....	4
1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	6
C. SUMBER DAYA	15
D. ASPEK STRATEGI.....	17
E. ISU-ISU STRATEGI.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS.....	22
1. Visi.....	22
2. Misi.....	23
3. Tujuan dan Sasaran	23
4. Indikator Kinerja	24
5. Strategi dan Kebijakan.....	25
6. Penetapan Kinerja.....	29
7. Komitmen Kinerja Tahun 2022.....	31
8. Pernyataan Keberhasilan Komitmen.....	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja	35
3.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.3 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	50
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	57
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	58
C. RENCANA TINDAK LANJUT	58

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan besar dalam membangun *good governance* dan merupakan salah satu faktor utama pendorong pembangunan ekonomi. TIK juga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*) ke depan.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka akuntabilitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja.

Maksud dan tujuan penyusunan LKJ Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran / target yang telah ditetapkan.

- b. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2018-2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2022.
- c. Sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi;
9. Peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
11. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
13. Peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. PermenPAN Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Nomor 4 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Jayawijaya tahun 2008 – 2028;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Jayawijaya tahun 2013 – 2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya;

29. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2014;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

1. Struktur Organisasi

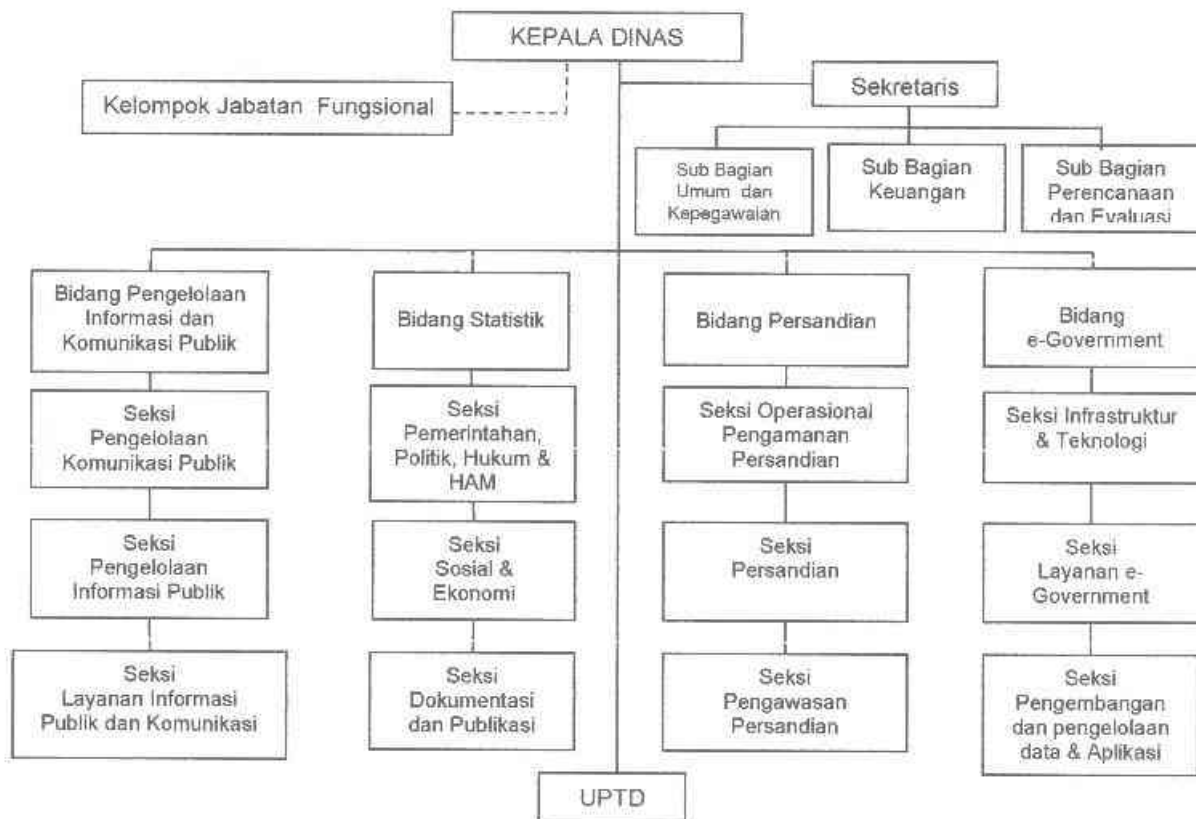
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - Seksi pengelolaan informasi publik
 - Seksi pengelolaan komunikasi publik
 - Seksi layanan informasi publik & hubungan
3. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas:
 - Seksi infrastruktur dan teknologi
 - Seksi pengembangan dan pengelolaan data & aplikasi
 - Seksi layanan e-Government
4. Bidang Persandian, terdiri atas :
 - Seksi tata kelola persandian
 - Seksi operasional pengamanan persandian
 - Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian

5. Bidang Statistik, terdiri atas :
 - Seksi Sosial Ekonomi
 - Seksi pemerintahan, politik, Hukum dan HAM
 - Seksi dokumentasi & publikasi
6. UPT Dinas
 - Sub Bagian Tata Usaha (belum terisi)
7. Kelompok Jabatan Fungsional (belum terisi)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang komunikasi dan informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Papua. Tugas pokok dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi;
4. Pelaksanaan Pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi;
5. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

2. TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Sekretaris, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

1.1 Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan ;
5. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan dinas ;

1.2 Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian keuangan mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan ;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan ;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan ;
4. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan ;
5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional ;
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan ;

7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1.3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian program mempunyai fungsi** menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama ;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama ;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas ;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama ;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral ;
6. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika ;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan ;

8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi publik dan hubungan media ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik ;
- c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

4. TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas.

Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
2. Seksi pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi ;
3. Seksi Layanan e-Government.

2. TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

2. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jarring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
3. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
5. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar, dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
6. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
7. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
8. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
9. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas ;

Bidang Persandian, membawahi :

1. Seksi Tata Kelola Persandian ;
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian ;
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

2. TUPOKSI BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pemerintahan, politik, hukum dan HAM ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi statistik ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas ;

Bidang Statistik, membawahi :

5. Seksi Sosial Ekonomi ;
6. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM ;
7. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.

3. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas ;

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;
2. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki ;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya ;
4. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ;
5. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut ;
6. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

C. SUMBER DAYA

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja. Jumlah pegawai di dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya adalah 33 orang, terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Tenaga Kontrak dan 1 orang tenaga IT jaringan. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER/KONTRAK/TENAGA IT
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN PER BIDANG

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d													
II/a	2										2		2
II/b		1				1					1	1	2
II/c		1		1								2	2
II/d			1								1		1
III/a	1	3					2	1	1		4	4	8
III/b									1		1		1
III/c		1				1				1		3	3
III/d		1								2		3	3
IV/a								1				1	1
IV/b	1	1									1	1	2
IV/c													
IV/d													
IV/e													
HONORER													
KONTRAK	1	1	2	1	1				2		6	2	8
JUMLAH	5	9	3	2	1	2	2	2	4	3	16	17	33
TOTAL	14		5		3		4		7		33		0

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2022)

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 1.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
DAN TENAGA KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD													
SUTP													
SLTA	2	2	1	1	1				1		5	3	8
D1													
D2													
D3			1								1		1
S1	2	6	1	1	1	1	2	2	1	2	7	12	19
S2	1	1							2	1	3	2	5
S3													
Jumlah	5	9	3	2	2	1	2	2	4	3	15	16	33
Total	14		5		3		4		7		33		

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2022)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dengan jumlah yang cukup namun perlu ada penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan kompetensi, pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM pegawai.

D. ASPEK STRATEGI

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki aspek strategis yaitu menyediakan infrastruktur jaringan, data perencanaan pembangunan daerah dan menyebarkan informasi publik yang bermanfaat. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Adapun langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika dengan meliputi berita/informasi, menyebarkan informasi melalui media elektronik (Website dan Vidiotron), media luar ruangan (BTS) dan merespon layanan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke perangkat daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Peningkatan pelayanan keamanan komunikasi dan informasi daerah;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

E. ISU-ISU STRATEGI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil isu-isu strategis sebagai berikut :

Pada bidang Komunikasi dan Informatika isu-isu strategis yang muncul antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum semua desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Belum terintegrasi aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data dari Perangkat Daerah.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD
2. Perjanjian Kinerja kepala OPD Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja kepala OPD Tahun 2023
4. Jenis penghargaan yang diterima / diperoleh OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 3 (tiga) urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok "***melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan***".

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi.
4. Pelaksanaan Pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi.
5. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi.
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 dan Rencana kerja Tahun 2022.

A. Rencana Strategis

1. VISI

Visi sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun visi Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya.”

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Misi kabupaten yang menjadi misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan program yang dicapai oleh dinas.

Adapun misi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan misi satu (1) Kabupaten Jayawijaya yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari setiap misi, yaitu sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 1.1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Sasaran 1.1.1	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan Akuntabel
Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi
Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
Sasaran 2.1.4	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja
Sasaran 2.1.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

4. INDIKATOR KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018 - 2023. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Persentase OPD menerapkan SPBE
2. Persentase sistem yang andal dan valid
3. Indeks kepuasan masyarakat
4. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
5. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Persentase OPD menerapkan SPBE
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
5	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Strategi yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika bertumpu pada kondisi strategis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dituangkan dalam rencana strategis Tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD;
2. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas persandian;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya;
7. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
2. Peningkatan sistem e government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
3. Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
4. Peningkatan keamanan pada ruang private pimpinan/pejabat dan peningkatan verifikasi informasi yang diterima;
5. Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
7. Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya			
MISI : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Menguatnya sistem pemerintah berbasis elektronik dan akuntabel	Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD	Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi	Peningkatan sistem e government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
		Meningkatkan kapasitas persandian	Peningkatan keamanan pada ruang private pimpinan/pejabat dan peningkatan verifikasi informasi yang diterima
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi
	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya;	Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan.	Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi pencapaiannya, digambarkan secara jelas pada tabel 2.3

Tabel 2.3

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDI SI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencyicngaraan pemerintah daerah.	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel.	Persentase OPD menerapkan SPBE	20	20	40	60	80	100
		Meningkatnya kualitas dan keandatan data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	19,67	20	25	30	35	40
		Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	42,45	50	60	70	75	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	0,25	0,23	0,22	0,15	0,10	0,01

6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2018-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Adapun penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memuat indikator kinerja utama dinas Komunikasi dan Informatika serta program dan kegiatan yang menunjang untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 dan lampiran perjanjian kinerja tahun 2022.

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Persentase OPD menerapkan SPBE	62,40	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000.000
				Program Aplikasi dan Informatika Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.013.000
				Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	841.430.000
				Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.681.475.000
2	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid	62,40	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	200.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50.000.000

				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	144.987.000
3	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	62,40	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	74.987.000
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.000.000
4	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000

7. Komitmen Kinerja Tahun 2022

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2022 digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut :

Misi 1

Tujuan 1.1

Sasaran 1.1.1

Sasaran satu indikator satu menggambarkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD dalam rangka penguatan sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel targetnya naik sebesar 25,45% dari 60% di tahun 2021 menjadi 85,45% di tahun 2022 seperti dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	%	60	80

Jumlah anggaran tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini Rp 4.000.000.000 dan Rp. 155.013.000; Rp. 841.430.000; Rp. 1.681.475.000

Sasaran 1.1.2

Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi dengan meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan kapasitas keamanan informasi, maka target meningkat 16,59% dari tahun 2021 sebesar 62,40% dan tahun 2022 sebesar 78,99% seperti tertera di tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Persentase sistem yang andal dan valid	%	62,40	78,99

Jumlah anggaran tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini Rp. 200.000.000,- ; Rp. 50.000.000 dan Rp. 144.987.000

Sasaran 1.1.3

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat. Target indikator ini juga meningkat 15% dari tahun 2021 sebesar 62,40% dan tahun 2022 sebesar 78,99% seperti tertera di tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	30	35

Jumlah anggaran tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini Rp 74.987.000 ; Rp. 50.000.000

Sasaran 1.1.4

Sasaran empat indikator empat menggambarkan meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dengan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab jayawijaya. Adapun target dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	70	75

Jumlah anggaran tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini Rp 10.000.000,-

Sasaran 1.1.5

Sasaran lima indikator lima menggambarkan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dengan strategi meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Adapun target dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	0,15	0,10

Jumlah anggaran tahun 2022 untuk mencapai sasaran ini Rp 10.000.000,-

8. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian
	%	KeteranganPersentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja yang diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2022 , diuraikan pada bab tiga ini. Agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya , namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2022. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, , membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, selain itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2022, dan capaian dibanding target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, di uraikan pada tabel 3.8.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1 Tujuan1, Sasaran1 yaitu :**

➤ **Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel**

indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Persentase OPD menerapkan SPBE.

Persentase OPD yang menerapkan SPBE

- $$\frac{\text{Jumlah PD yang terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{29 \text{ OPD}}{29 \text{ OPD}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Tahun 2021 ada 2 perangkat daerah yang belum terkoneksi internet yaitu ketahanan pangan dan Kesbangpol. Tahun 2022 sudah terkoneksi menggunakan wifi

- $$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{28} \times 100\%$$

$$= 10,71 \%$$

- Aplikasi yang sudah terintegrasi yaitu (sirup-sipd), (Reporting pengadaan barang jasa-sirup-catalog LKPP), (Simka-BKN prov).
- Terdapat 9 perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbagi pakai (umum) yaitu BPKAD, DUKCAPIL, PTSP, RSUD, SETDA bagian hukum, SETDA bagian pengadaan barang dan jasa ada 2, Dinas Sosial, BAPPEDA
- Terdapat 6 layanan Aplikasi khusus yang diimplementasikan di pemda yaitu E database, Aplikasi Reporting pengadaan barang jasa, aplikasi TPP, Simka BPKSDM, aplikasi SIP rumah, aplikasi gaji BPKAD
- Tersedia 13 aplikasi lokal di OPD yaitu, E kepegawaian Bappeda, E surat menyurat Bappeda, E Monev, ASB, E Surat menyurat kominfo, E kepegawaian kominfo, E aset kominfo, simanis kominfo, aplikasi gaji keuangan, simpada keuangan, sim aset keuangan, E surat keuangan, absensi keuangan

- $$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{13 \text{ sub. domain}}{29 \text{ PD}} \times 100\%$$

$$= 44,83\%$$

Tahun 2021-2022 tersedia 13 sub domain sedangkan tahun sebelumnya 8 sub domain.

- $$\frac{\text{Persentase Outleat Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat ramai penduduk}}{\text{Jumlah permintaan internet gratis}} \times 100\%$$

$$= \frac{169}{231} \times 100\%$$

$$= 72,72\%$$

- Jumlah permintaan internet gratis ke Dinas Kominfo tahun 2022 sebanyak 231 permintaan,
- Total yang terpasang tahun 2022 sebanyak 168 site

Jadi Persentase OPD yang menerapkan SPBE adalah

$$= \frac{100\% + 10,71\% + 44,83\% + 72,72\%}{4}$$

= 57,07 %, capaian kinerja indikator ini dikategorikan cukup berhasil

Tabel 3.1

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1, Indikator 1

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	80	57,07	71

Target perangkat daerah yang menerapkan e-government pada tahun 2022 yaitu 80% dan direalisasikan sebesar 57,07% dengan capaian kinerja 71%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat perubahan angka yang dipengaruhi oleh bertambahnya aplikasi yang sudah diimplementasikan, aplikasi berbagi pakai dan aplikasi lokal yang disediakan perangkat daerah. Skor nilai capaian kinerja dikategorikan cukup berhasil.

Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk peningkatan capaian kinerja adalah perlunya peningkatan, pengembangan dan perbaikan dari masing –masing kategori pendukung e-government seperti penyusunan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi terintegrasi, Penganggaran dan Peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	DAU
		Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DAU
3	Program Aplikasi dan Informatika	Program Aplikasi dan Informatika Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DAU

2. **Misi 1 Tujuan1, Sasaran 2** yaitu :

➤ **Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi**

Untuk indikator ke dua yaitu Persentase sistem yang andal dan valid.

$$\begin{aligned} & \bullet \frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Sumber informasi}} \times 100\% \\ & = \frac{29}{29} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.2

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2, Indikator 2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sistem yang andal dan valid	78,99	100	127

Dari tabel 3.2 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Persentase sistem yang andal dan valid, capaian kinerja dan realisasi kinerjanya 100% dari target 78,99%, capaian indikator di katagorikan sangat berhasil karena kinerjanya tercapai lebih dari yang ditargetkan. Melalui kegiatan pengumpulan dan analisis data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan, dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPS sebagai pembina data, melaksanakan tahapan penyelenggaraan statistik sektoral untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bekerjasama sebagai tim, dihasilkan produk data berupa dokumen PDIP, LPP, dan ASPM .

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DAU
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	DAU
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DAU
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	

3. **Misi 1 (satu) Tujuan1 (satu), Sasaran 3 (tiga) yaitu :**

➤ **Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik**

Untuk indikator ke Tiga dari sasaran tiga yaitu Indeks kepuasan masyarakat.

- Jumlah Artikel informasi yang terupload di website

$$\frac{\text{Jumlah Artikel Informasi}}{\text{Target capaian}} \times 100\%$$

$$= \frac{104}{150} \times 100\%$$

$$= 69,33 \%$$

- $$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah permintaan penyiaran berita}} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- Total capaian kinerja indikator 3 tahun 2022 adalah

$$\frac{69,33 \% + 100\%}{2}$$

= 84,67 % capaian kinerja indikator ini dikategorikan cukup berhasil

Tabel 3.3
Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3, Indikator 3

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks kepuasan masyarakat	35	84,67	242

Dari tabel 3.3 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 242 dan dikategorikan cukup berhasil karena capaian realisasi melebihi target. Adanya pemekaran provinsi berdampak pada meningkatnya kegiatan pemerintahan sehingga berita yang diliput dan diupload meningkat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DAU
		Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DAU

4. **Misi 1 (satu) Tujuan 1 (satu), Sasaran 4 (empat) yaitu :**

➤ **Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja**

Untuk indikator ke empat dari sasaran empat yaitu nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3.4

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 4, Indikator 4

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	75	60,65	

Dari table 3.4 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Capaian akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diperoleh dari hasil penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya melalui dokumen nomor 700/17/LHE/INSP/2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 dengan nilai 60,65 atau predikat **B**. Predikat ini masuk dalam kategori baik artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya predikat yang diperoleh **CC**. Predikat SAKIP hasil evaluasi memberi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja. Untuk itu dibutuhkan penguatan komitmen dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, pemanfaatan pengukuran kinerja, dan penganggaran berbasis kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU

5. **Misi 1 (satu) Tujuan1 (satu), Sasaran 5 (lima) yaitu :**

➤ **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**

Untuk indikator ke Lima dari sasaran Lima yaitu Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

- Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK}}{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

Tabel 3.5

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2, Indikator 2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	0,10	0	0

Dari tabel 3.5 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya capaian realisasinya 0 persen dari target 0,10 persen artinya capaian kinerja pengelolaan keuangan berhasil dengan tidak adanya temuan BPK. karena Dinas Komunikasi terus berupaya meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dengan cara menggunakan anggaran belanja sesuai posnya, menyusun dan mengumpulkan laporan keuangan dan laporan aset tepat waktu. Hasil persentase 0% artinya capaian kinerja pengelolaan keuangan berhasil dengan tidak adanya temuan BPK.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Uporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DAU

Adapun indikator dari **program dan kegiatan pendukung** indikator kinerja utama yang menunjang keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **kegiatan rutin** yang diukur berdasarkan indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :

6. Untuk indikator pendukung **pertama** yaitu Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator ini memiliki satu program empat kegiatan dan Sembilan sub kegiatan yang terdiri dari Kegiatan pertama pemenuhan layanan administrasi umum sub kegiatannya Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan kedua, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya . Kegiatan ketiga Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kegiatan keempat pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sub kegiatannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan.

Tabel 3.8
Tingkat capaian kinerja
Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	TARGET RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI SKOR KINERJA
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	80	71	CUKUP BERHASIL
2	Persentase sistem yang andal dan valid	78,99	127	SANGAT BERHASIL
3	Indeks kepuasan masyarakat	35	242	CUKUP BERHASIL
4	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	75	81	BERHASIL
5	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	0,10	0	SANGAT BERHASIL

--	--	--	--	--

- Rata-rata tingkat capaian kinerja adalah

$$= \left(\frac{57,07 + 100 + 84,67 + 60,16 + 100}{5} \right)$$

$$= \frac{401,9}{5} \times 100 \%$$

$$= \underline{80,38 \%}$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan indikator kinerja sasaran yang diraih dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 80,38% sehingga dapat dikategorikan **berhasil**.

3.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh ketersediaan sumber daya baik Sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian kinerja Dinas. Tahun 2022 ASN dan pegawai kontrak Dinas Kominfo berjumlah 33 orang terdiri dari 14 pejabat struktural, 11 orang Staf Pelaksana Umum dan 8 orang tenaga kontrak. Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah tersedianya Jaringan internet yang terkoneksi ke SKPD, website dan vidiotron.

3.1 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.3.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2022 sebesar 80,38 %. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparatur sipil Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi infromasi berupa jaringan internet dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3.2 Analisa Kegagalan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kominfo tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia dalam mempublikasikan informasi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Belum maksimalnya penggunaan sub domain pada opd untuk mengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
6. Kurangnya dukungan/perhatian dari Tim anggaran dalam merealisasikan program dan kegiatan yang diusulkan.

3.3.3 Analisa alternatif / Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis dibidang komunikasi dan Informasi, statistik dan persandian.
3. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas Kominfo, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada OPD dalam pemanfaatan media Informasi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).
6. Adanya komitmen dalam merealisasikan program dan kegiatan yang diusulkan ke Tim Anggaran.

3.3.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2022 ini akan dipaparkan capaian kinerja program secara keseluruhan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya, yaitu :

Tabel 3.9

Analisa Program/kegiatan/sub kegiatan pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Program Aplikasi dan Informatika Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	60,78	99	1
2	<p>Program penyelenggaraan statistik sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p>	100	90	1

3	Program Informasi dan Komunikasi publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	56,4	99,8	1
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79	100	1
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Uporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	100	1
JUMLAH		476,7	97	1

Dari tabel diatas, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 telah mencapai efiseinsi sebesar yaitu 1 dari dari rata-rata capain kinerja program yang telah dilaksanakan sebesar 476,7% dengan penyerapan anggaran 97%. Secara umum pencapaian kinerja dan efisiensi dari aspek program telah dicapai karena realisasi anggaran lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerja.

3.3.5 Akuntabilitas Keuangan

a. Alokasi dan Realisasi Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan, selain faktor pendukung ada pula faktor pembiayaan turut serta dalam pencapaian target capaian indikator keberhasilan. Pembiayaan program dan kegiatan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pembiayaan dalam APBD diuraikan dalam 2 kelompok belanja yaitu, belanja operasi dan belanja modal. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, alokasi dana pada Dinas Kominfo kabupaten Jayawijaya tahun 2022 adalah Rp. 10.464.689.366,- (sebelum perubahan) dan setelah perubahan sebesar Rp. 11.285.490.004,- terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.

9.032.890.866,- (sebelum perubahan), dan setelah perubahan Rp. 9.853.691.504,- selisih perubahan anggaran sebesar Rp. 820.800.638,- sedangkan belanja modal Rp. 1.431.798.500,- (sebelum perubahan) dan Rp. 1.431.798.500,- (setelah perubahan), berarti tidak terdapat perubahan anggaran. Belanja operasi dipergunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal dipergunakan untuk pelaksanaan belanja modal pralatan dan mesin.

Sedangkan realisasi Belanja pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.001.839.856,- (98,04%) meliputi Belanja operasi Rp. 9.570.041.356,- (98,96%) dan Belanja modal Rp. 1.431.798.500,- (100 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Realisasi anggaran belanja

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I.	Belanja		11.285.490.004	11.001.839.856	97
A.	Belanja Operasi dan Belanja Modal		11.285.490.004	11.001.839.856	97
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8.022.214.004	7.807.051.851	97
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.332.864	2.867.685.800	93
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.737.640	256.988.051	99,7
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.471.500	208.400.000	99,9
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.453.672.000	4.453.672.000	100
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000	10.306.000	86
2	Program Informasi dan Komunikasi publik		2.649.277.000	2.644.846.452	99,8
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.649.277.000	2.644.846.452	99,8
3	Program Aplikasi Informatika		155.013.000	155.013.000	100
	2.16.03.2.01	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.013.000	155.013.000	100
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		250.000.000	199.991.488	80
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	199.991.488	80

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		144.987.000	144.937.065	99,9
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	144.987.000	144.937.065	99,9

Dari tabel diatas diperoleh capaian realisasi sebesar 97 persen yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97% ;
2. Program Informasi dan Komunikasi publik 99,8% ;
3. Program Aplikasi Informatika 100% ;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 80%;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 99,9%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya secara umum telah berhasil dilaksanakan. Kesimpulan yang diambil bahwa sasaran yang ditetapkan oleh dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2022 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kinerja capaian memenuhi capaian target dengan kategori **berhasil**, walaupun dalam penyerapan anggarannya ada beberapa yang belum 100%. Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diraih pada tahun 2022 ini pada prinsipnya tidak boleh berhenti, akan tetapi harus selalu disempurnakan di masa-masa mendatang, sehingga perlu dirumuskan strategi yang akan dijadikan dasar kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebagaimana termuat dalam rencana tindak lanjut yang diuraikan dalam poin C pada bab ini.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 terdapat beberapa hambatan permasalahan yaitu :

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
5. Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Sudah terbangunnya aplikasi data, namun belum terintegrasi dan masih offline. serta butuh pelatihan data statistik dan cara pengimputan pada aplikasi.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Permasalahan yang ada serta kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal pada tahun 2022 akan dilaksanakan pada tahun 2023, dengan antisipasi dan prioritas pada :

- 1) Mengikuti Pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- 2) Sosialisasi internal akan pentingnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dinas dengan mengundang instansi terkait sebagai narasumber;
- 3) Memotivasi pegawai negeri sipil yang ada agar dapat meningkatkan kinerja dan disiplin;
- 4) Komitmen dan kebijakan pimpinan dalam menetapkan kegiatan dan menyediakan anggaran belanja kegiatan;
- 5) Menyediakan *data center* yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet sehingga penyelenggaraan SPBE lebih optimal;

- 6) Menyediakan Perangkat keras yang dibutuhkan di bidang persandian untuk tindakan pengamanan informasi terhadap perangkat daerah;
- 7) Penyediaan Aplikasi data dan informasi untuk menampung data yang diinput dari OPD serta pelatihan mutu SDM untuk data statistik dan aplikasinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2022.

Wamena, Maret 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK I**

NIP. 19710806 199712 1 001